

LAPORAN NOTULA

Rapat Tanggapan Usulan Komitmen RAN OGI VII antara Bawaslu dan KOPEL

Kamis, 24 November 2022 – Pukul: 14.00 – 16.00

PENDAHULUAN

Dalam mewujudkan keterbukaan pemerintah diperlukan ko-kreasi dengan masyarakat sipil. *Open Government* Indonesia memfasilitasi proses ko-kreasi tersebut dengan menampung usulan dari organisasi masyarakat sipil untuk dapat disampaikan kepada pemerintah sehingga dapat menjadi awal dari ko-kreasi. Usulan tersebut terdapat di berbagai sektor, salah satunya adalah dalam sektor pelaksanaan pemilihan umum. Usulan yang berada di sektor ini berfokus kepada pengawasan pemilu supaya terbebas dari tekanan dan disinformasi. Usulan ini diajukan oleh Komisi Pemantau Legislatif (KOPEL) dan diajukan kepada Bawaslu.

TUJUAN

Kegiatan rapat ini bertujuan untuk:

1. Memaparkan usulan proposal RAN OGI VII kepada K/L
2. Mendiskusikan usulan proposal RAN OGI VII antara CSO pengaju dan K/L terkait

PEMBAHASAN

1. **Theo** selaku perwakilan dari Sekretariat *Open Government* Indonesia yang menyampaikan penjelasan sebagai berikut:
 - Rapat pada hari ini dilakukan untuk mendengarkan tanggapan dari Bawaslu terhadap usulan proposal dalam RAN OGI VII yang diajukan oleh KOPEL. Sekretariat OGI sudah berkoordinasi kepada Bawaslu untuk hadir dalam rapat hari ini.
 - Terdapat 3 ukuran keberhasilan yang diajukan KOPEL dalam usulan ini, yaitu disusunnya mekanisme penanganan pengaduan disinformasi dalam pemilihan umum, terlibat aktif dalam forum *multistakeholder* untuk penyusunan mekanisme penanganan pengaduan disinformasi, dan terlibat aktif dalam penyusunan mekanisme penanganan pengaduan disinformasi dalam pemilihan umum. Ukuran keberhasilan ini diharapkan dapat disesuaikan dengan rencana kerja dari Bawaslu sehingga dapat dijalankan kolaborasi.
 - Ada 2 penanggungjawab dari usulan ini, yaitu KOPEL dan Bawaslu yang sudah disusun target capaian yang harus dicapai oleh kedua pihak yang terlibat di dalam usulan proposal ini.
 - Rencana aksi OGI tidak harus bersifat baru namun dapat melanjutkan dari usulan sebelumnya. Usulan tersebut harus disesuaikan dengan rencana kerja dari K/L terkait. Jika merunut pada *timeline* penyusunan RAN OGI VII, 12 Desember merupakan waktu akhir untuk finalisasi usulan. Perlu ada kepastian dan penyesuaian penyusunan RAN OGI dengan rencana kerja Bawaslu supaya tidak melewati tenggat waktu.
2. **Nurdiyansyah** selaku perwakilan dari Biro Fasilitas Bawaslu yang menyampaikan penjelasan sebagai berikut:
 - Pada tahun 2023, Bawaslu sudah menyiapkan kebijakan dan antisipasi disinformasi. Untuk *timeline* akan disesuaikan dengan agenda dari pimpinan dan agenda tahapan pengawasan dari Bawaslu.
 - Pada bulan November 2022 ini Bawaslu sedang fokus pada agenda pendidikan pengawasan partisipatif sehingga belum menemukan waktu yang *clear*. Baru

pada bulan Desember akan disusun seluruh kegiatan dan rencana kerja yang akan dilaksanakan di tahun 2023. Belum ada tanggal pasti untuk penyusunan rencana kerja di tahun 2023.

- Bawaslu belum bisa memberikan jawaban yang pasti perihal *timeline* pelaksanaan dari target capaian RAN OGI. Rapat penyusunan rencana kerja Bawaslu di tahun 2023 baru akan dilaksanakan pada tanggal 9/10 Desember setelah agenda di tahun 2022 ini selesai dijalankan. Pada tanggal 12 Desember sesuai tenggat waktu finalisasi RAN OGI, Bawaslu akan mengusahakan hal tersebut.
 - Bawaslu belum mengadakan Perjanjian Kerja Sama dengan KOPEL sehingga Bawaslu akan mengikuti apa yang dilakukan oleh KOPEL jika hubungan kelembagaan keduanya memberikan benefit untuk kedua pihak.
3. **Iji Jaelani** selaku perwakilan dari Bawaslu yang menyampaikan pembahasan sebagai berikut:
 - Bawaslu sebagai otoritas yang memegang kewenangan dalam mengatasi disinformasi akan menjalankan penyusunan regulasi dan implementasinya dengan kolaborasi.
 - Belum bisa menentukan *timeline* karena masih ada agenda yang perlu diselesaikan pada tahun 2022 ini.
 4. **Anwar** selaku perwakilan dari KOPEL yang menyampaikan pembahasan sebagai berikut:
 - Bulan Desember akan dilaksanakan verifikasi partai politik sehingga perlu segera ada *timeline* untuk penyusunan rencana kerja di tahun 2023. Bawaslu harapannya dapat memberikan ruang partisipasi bagi KOPEL untuk terlibat.
 5. **Burhanuddin** selaku perwakilan dari KOPEL yang menyampaikan pembahasan sebagai berikut:
 - Untuk pembahasan mengenai Perjanjian Kerja Sama dapat diagendakan diskusi kembali antara KOPEL dan Bawaslu

KESIMPULAN

Pemilu merupakan agenda kenegaraan yang rawan terhadap tekanan dan disinformasi akibat besarnya kepentingan politik yang masuk dalam agenda tersebut. Untuk mencegah adanya tekanan dan disinformasi sekaligus sebagai upaya untuk menciptakan pemilu yang bebas berekspresi diperlukan mekanisme pengawasan yang ideal dan tepat sasaran sehingga dapat mengantisipasi permasalahan disinformasi yang rawan menyeruak di tengah jalannya pemilu.

DOKUMENTASI

Perencanaan Jangka Panjang	Ukuran Keberhasilan	B1K (2023)	B1E (2023)	B1E (2024)	B2K (2024)	Komentar/Tanggapan
<p>2023-2024</p> <p>Pengawasan Pemilihan Umum RI</p>	<p>Disampurnya mekanisme pengawasan pemilihan dengan sistematis dan terpadu</p> <p>Perubahan UU Pemilut</p> <p>Tercapainya nilai indeks kepercayaan publik terhadap lembaga penyelenggara pemilihan dengan partisipasi masyarakat</p>	<p>Tercapainya nilai indeks kepercayaan publik terhadap lembaga penyelenggara pemilihan dengan partisipasi masyarakat</p>	<p>Audansi untuk menyempurnakan policy brief pengawasan pemilu</p> <p>Hasil review rancangan awal mekanisme pengawasan pemilu yang dapat diinformasikan kepada Komisi Pemilihan Umum</p> <p>Adanya politik media untuk meningkatkan partisipasi</p>	<p>Hasil review rancangan awal mekanisme pengawasan pemilu yang dapat diinformasikan kepada Komisi Pemilihan Umum</p>	<p>Input hasil monitoring CSO terhadap mekanisme pelaksanaan pemilu 2024</p>	